

Strategi Untuk Mengendalikan Inflasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Luk Lu'us Syarifah

Universitas Trunojoyo Madura

Korespondensi penulis: 220721100111@student.trunojoyo.ac.id

Husnul Khotimah

Universitas Trunojoyo Madura

E-mail: 220721100062@student.trunojoyo.ac.id

Yusnia Yusnia

Universitas Trunojoyo Madura

E-mail: 220721100070@student.trunojoyo.ac.id

Abstract. *Inflation is an economic issue that is often discussed in Indonesia. Where inflation is an economic phenomenon that involves an increase in goods and services in the world economy. However, in the context of Islamic economics, inflation is not just a difference in prices, but leads to ethical and social differences that violate sharia principles. Indonesia has made various efforts to control inflation, including controlling supply and demand, stabilizing prices of daily necessities, and regulating monetary and fiscal policies. This research aims to find out strategies for controlling inflation according to Islam. This research uses a qualitative approach using systematic literature review (SLR) techniques. to control inflation according to Islamic economics. This fiscal policy includes state spending for the public interest, taxes and loans to stabilize the national economy and public welfare, or is controlled by sharia money, namely by avoiding the use of instruments based on usury, gharar, maisyir and zhulum. Islamic economics as an economic system has its own methods and strategies for controlling inflation which are very different from other economic systems. Islamic economics accepts monetary and fiscal policy as part of efforts to control inflation. However, to achieve standards of socio-economic justice, efforts need to be made to maintain price stability through strategies of moral improvement, equal distribution of income and wealth, and the elimination of usury.*

Keywords: *inflation, controlling inflation, Islamic economics.*

Abstrak. Inflasi merupakan isu perekonomian yang sering dibicarakan di Indonesia. Dimana Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang melibatkan peningkatan barang dan jasa dalam dunia perekonomian. Namun dalam konteks ekonomi Islam, inflasi bukan hanya sekedar perbedaan harga, namun berujung pada perbedaan etika dan sosial yang melanggar prinsip syariah. Berbagai upaya telah dilakukan Indonesia untuk mengendalikan inflasi, antara lain pengendalian penawaran dan permintaan, stabilisasi harga kebutuhan sehari-hari, serta pengaturan kebijakan moneter dan fiskal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi untuk mengendalikan inflasi menurut islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik sistematik literatur review (SLR). untuk mengendalikan inflasi menurut ekonomi islam Kebijakan fiskal tersebut meliputi belanja negara untuk kepentingan umum, pajak dan pinjaman untuk menstabilkan perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat, atau dikendalikan oleh uang syariah, yaitu dengan menghindari penggunaan instrumen yang berdasarkan riba, gharar, maisyir dan zhulum. Ekonomi Islam sebagai suatu sistem ekonomi mempunyai metode dan strategi tersendiri dalam mengendalikan inflasi yang sangat berbeda dengan sistem ekonomi lainnya. Ekonomi Islam menerima kebijakan moneter dan fiskal sebagai bagian dari upaya mengendalikan inflasi. Namun, untuk mencapai standar keadilan sosial ekonomi, harus dilakukan upaya menjaga stabilitas harga melalui strategi perbaikan moral, pemerataan pendapatan dan kekayaan, serta penghapusan riba.

Kata kunci: inflasi, pengendalian inflasi, ekonomi islam.

PENDAHULUAN

Inflasi adalah suatu keadaan dimana harga suatu barang tertentu terus meningkat atau berlangsung dalam waktu yang lama dan menyeluruh. Inflasi ini dapat berdampak pada perekonomian sehingga terjadi penurunan nilai mata uang yang dapat menyebabkan gangguan pada fungsi dari uang itu sendiri (Ardiansyah, 2023). Inflasi ini seperti penyakit dan harus dikendalikan karena inflasi yang terus terjadi dalam waktu yang lama dapat menimbulkan keresahan sosial lainnya. Misalnya peningkatan harga akan mempersulit kehidupan masyarakat, terutama mereka yang berpendapatan kecil dan tetap (Suhardi, 2022)

Sadono Sukirno berpendapat bahwa inflasi adalah suatu proses yang bisa menyebabkan kenaikan harga pada sistem prekonomian yang artinya apabila terlalu banyak uang beredar di masyarakat daripada keinginan untuk membeli suatu barang maka, akan memicu terjadinya inflasi (Naqiyya, dkk, 2023). Salah satu penyebab inflasi adalah konsep "nilai waktu uang" yang menyatakan bahwa nilai uang pada saat ini lebih berharga daripada nilai uang yang sama di masa depan. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku pada prinsip syariah. Dimana pada prinsip syariah disebut "*Economic Value Of Time*" yang berarti bahwa uang sebenarnya tidak mempunyai nilai waktu, mempunyai nilai ekonomi dan hanya digunakan sebagai alat tukar saja. Oleh karena itu, salah satu strategi pengendalian inflasi adalah dengan menerapkan konsep nilai "*Economic Value Of Time*" (Fajar, 2021).

Inflasi umumnya tercermin dari kenaikan harga-harga, dan ada dua faktor utama yang mempengaruhi inflasi diantaranya tekanan inflasi dari sisi permintaan dan sisi penawaran. Ada dua jenis inflasi: inflasi inti dan inflasi non-inti. Inflasi inti dipengaruhi oleh faktor fundamental ekonomi seperti interaksi penawaran dan permintaan, serta faktor eksternal seperti nilai tukar dan harga komoditas internasional. Sedangkan inflasi non-inti merupakan inflasi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor non-fundamental seperti inflasi volatile food, inflasi harga terkendali, dan inflasi indeks harga konsumen (CPI). (Budi T, & Muhammad A. B, 2021)

Inflasi yang terjadi di suatu negara bisa mempengaruhi semua kegiatan perekonomian masyarakatnya. Sehingga diperlukannya peran pemerintah dalam mempertahankan stabilitas ekonomi negara tersebut dengan mengantisipasi hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya inflasi (Sari, dkk 2023). Di Indonesia inflasi merupakan isu perekonomian yang sering dibicarakan. Ada beberapa penyebab utama terjadinya inflasi di Indonesia, yang pertama adalah tingginya permintaan, ada beberapa faktor yang meningkatkan permintaan, antara lain

pertumbuhan jumlah penduduk, daya beli masyarakat yang meningkat, dan program pemerintah yang mendorong konsumsi. Alasan kedua yaitu kenaikan biaya produksi. Ketika biaya produksi seperti harga bahan mentah, tenaga kerja, dan energi naik, maka produsen cenderung akan menaikkan harga produknya. Peningkatan biaya produksi ini dapat disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal, seperti kenaikan harga minyak dunia atau fluktuasi nilai tukar. Opsi ketiga adalah kebijakan moneter atau fiskal yang akomodatif yang dapat meningkatkan peredaran uang di masyarakat. Jika peningkatan jumlah uang beredar ini tidak dibarengi dengan peningkatan produksi, maka harga cenderung naik. inflasi yang tinggi dapat berdampak negatif terhadap perekonomian. Potensi dampaknya mencakup penurunan daya beli masyarakat, peningkatan biaya hidup, dan ketidakstabilan perekonomian secara umum. Berbagai upaya telah dilakukan Indonesia untuk mengendalikan inflasi, antara lain pengendalian penawaran dan permintaan, stabilisasi harga kebutuhan sehari-hari, serta pengaturan kebijakan moneter dan fiskal. Selanjutnya, Bank Indonesia, sebagai bank sentral Indonesia bertanggung jawab dalam menjaga kestabilan harga dan melaksanakan kebijakan moneter sesuai dengan kondisi perekonomian. (Bintara & Wahyudi, 2019).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fitri Kurniawati (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengendalian Inflasi dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi efektivitas instrumen moneter syariah dilampung)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang efektivitas dalam mengendalikan inflasi menggunakan instrumen moneter syariah di kota lampung. Dimana kami mengembangkan penelitian sebelumnya dengan menawarkan keterbaruan bagaimana menyusun strategi untuk mengendalikan inflasi menurut persepektif ekonomi islam, penelitian kami lebih fokus terhadap strategi untuk mengendalikan inflasi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui strategi untuk mengendalikan inflasi menurut perspektif ekonomi islam. Diharapkan penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dalam konteks ekonomi islam, karena infalsi dianggap sebagai salah satu masalah ekonomi yang dapat menghambat kemajuan dan kestabilan ekonomi, sehingga strategi pengendalian inflasi ini penting.

Berikut adalah data penelitian inflasi di Indonesia 5 tahun terakhir (2019-2023) berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik (BPS):

Bulan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Januari	2,82	2,68	1,55	2,18	5,28	2,57
Februari	2,57	2,98	1,38	2,62	5,47	2,75
Maret	2,48	2,96	1,37	2,64	4,97	3,05
April	2,83	2,67	1,42	3,47	4,33	
Mei	3,32	2,19	1,68	3,55	4,00	
Juni	3,28	1,96	1,33	4,35	3,52	
Juli	3,32	1,54	1,52	4,94	3,08	
Agustus	3,49	1,32	1,591	4,69	3,27	
September	3,39	1,42	1,60	5,95	2,28	
Oktober	3,13	1,44	1,66	5,71	2,56	
November	3,00	1,59	1,75	5,42	2,86	
Desember	2,72	1,68	1,87	5,51	2,61	

Data BPS (Badan Pusat Statistik), inflasi di Indonesia mengalami penurunan dan kenaikan selama lima tahun terakhir, pada tahun 2019 inflasi Indonesia berada pada angka 2,82% di bulan januari dan terus mengalami penurunan sampai tahun 2020 yaitu sebesar 1,68% di bulan desember, ditahun 2021 tingkat inflasinya mengalami kenaikan yang sebelumnya 1,68% menjadi 1,87%. dan pada tahun 2022 inflasi mengalami peningkatan yang lebih tinggi lagi yaitu 5,51% dibandingkan dengan tahun 2019-2021, namun kembali mengalami penurunan pada september tahun 2023 dimana terjadi inflasi year on year (y-on-y) sebesar 2,28% dan naik kembali pada bulan november tahun 2023. Naik turunnya inflasi di Indonesia sebenarnya tidak terlepas dari kerja keras dan peran pemerintah dalam menstabilkan perekonomian negara, karena naik turunnya inflasi cenderung membawa permasalahan perekonomian bagi negara. Oleh sebab itu, sebagian besar negara di dunia menjadikan kebijakan makro ekonomi sebagai tujuan utama dalam menjaga stabilitas harga. Hal ini dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkepanjangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR), yang berdasarkan pada metodologi penelitian tertentu dan pengembangan kelanjutan untuk mengumpulkan dan menilai penelitian itu dengan fokus topik saat ini .Salah satu manfaat utama menggunakan metode (SLR) untuk penelitian adalah kemampuannya untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mensintesis semua penelitian yang tersedia dengan fokus pada fenomena yang menarik (Salwa Farodisa & Arissona Dia Indah Sari 2023). Dimana dalam penelitian ini identifikasi artikel yang di publikasikan lima tahun terakhir. Kami mengekstraksi

beberapa makalah yang dirangkum di Dimention, Google Scholar, dan BPS (Badan Pusat Statistik) lalu menyusunnya sebagai data sekunder. Selama pengumpulan data, peneliti menemukan 25 artikel di Google Scholar yang berkaitan dengan strategi pengendalian inflasi dalam perspektif Islam. Artikel tersebut merupakan review dari tahun 2019 hingga 2023.

Strategi Pencarian Sistematis

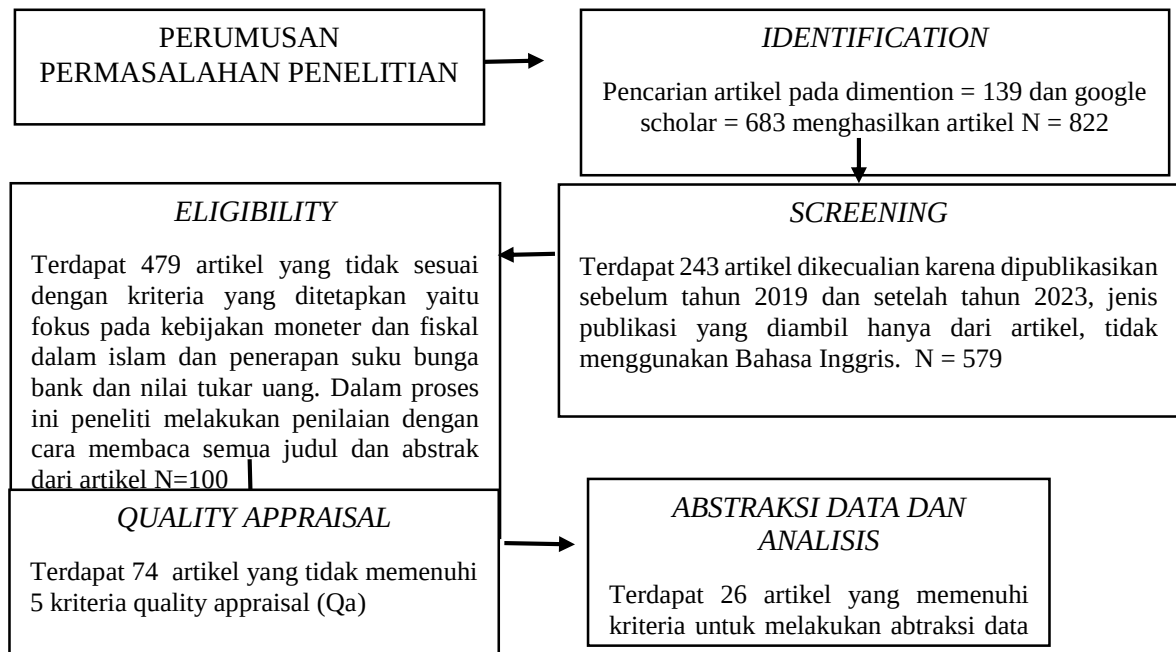


Diagram alur diatas diadaptasi dari (Mohammad shaffril et. Al, 2020). Terdapat tiga tahapan dalam proses Strategi Pencarian Sistematis yang dilakukan yakni idenfication, Screening, dan Eligibity.

Identification

Identification adalah proses pencarian menggunakan persamaan kata atau kata kunci terkait dengan penelitian yang dikaji yaitu inflasi menurut ekonomi islam, strategi pengendalian inflasi menurut persepektif ekonomi islam. Dalam hal ini dilakukan dengan tujuan memudahkan penulis untuk menemukan informasi sesuai dengan penelitian yang dikaji.sehingga melalui proses identifikasi ini ditemukan 139 artekel di dimentions, dan 683 pada google schoolar.

Screening

Pada tahapan ini terdapat 234 artikel atau jurnal yang dikecualikan karena dipublikasikan sebelum tahun 2019 sampai 2023 atau dalam jangka lima tahun terakhir, dimana penulis hanya

mengambil artikel atau jurnal yang tidak menggunakan bahasa inggris sehingga hasil artikel yang sesuai yaitu 579.

Eligibility

Selanjutnya dari 579 dari pada tahapan ini terdapat 479 artikel yang tidak sesuai dengan kriteria yang di inginkan seperti apakah artikel yang diteliti sebelumnya sudah sesuai dengan artikel? apakah artikel sebelumnya membahas mengenai pengendalian inflasi menurut ekonomi islam? Dimana artikel yang diambil yaitu artikel yang berkenaan dengan inflasi menurut perspektif ekonomi islam dan pengendalian inflasi menggunakan kebijakan moneter dan fiskal atau instrumen moneter syariah. Sehingga pada tahapan ini artikel yang sesuai yakni 100 artikel yang kemudian dianalisis dengan cara membaca semua judul dan ditemukan hasil akhirnya yaitu 15 artikel.

KAJIAN PUSTAKA

Inflasi

Penelitian yang dilakukan oleh (Simanungkalit, 2020). menyampaikan bahwa inflasi adalah fenomena kenaikan harga secara umum pada suatu produk secara berkepanjangan, Kenaikan harga satu atau dua barang bukanlah inflasi kecuali jika harganya naik sangat luas dan menimbulkan kenaikan harga pada barang lainnya.

Seperti negara -negara berkembang lainnya inflasi diindonesia yang utamanya disebabkan oleh faktor-faktor struktural daripada kebijakan moneter, oleh karenanya pengaruh *cost push inflation* lebih kuat dibandingkan dengan *demand pull inflation*. Misalnya kesenjangan antara permintaan dan penawaran secara agregat yang terjadi pada sub-sektor pertanian dan dapat menambah tingkat inflasi (Naqiyya dkk, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh (Reni mulyani, 2020) menjelaskan mengenai pengertian inflasi menurut Islam tidak berbeda dengan pengertian inflasi konvensional. Jika inflasi diartikan sebagai suatu fenomena meningkatnya harga komoditas secara menyeluruh dan terus menerus baik dengan sengaja atau alamiah, yang terjadi tidak saja pada suatu kawasan saja, melainkan di semua negara bahkan di seluruh dunia. Kenaikan harga ini bersifat terus menerus atau jangka panjang. pertumbuhan akan terus berlanjut kecuali solusi terhadap masalah inflasi ditemukan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Budi T, & Muhammad A. B, 2021) menjelaskan bahwa Inflasi umumnya tercermin dari kenaikan harga-harga, dan ada dua faktor utama yang

mempengaruhi inflasi yakni tekanan inflasi dari sisi permintaan dan sisi penawaran. Ada dua jenis inflasi, inflasi inti dan inflasi non-inti. Inflasi inti dipengaruhi oleh faktor fundamental ekonomi seperti interaksi penawaran dan permintaan, serta faktor eksternal seperti nilai tukar dan harga bahan baku internasional. Sedangkan inflasi non-inti merupakan inflasi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor non-fundamental seperti inflasi volatile food, inflasi harga terkendali, dan inflasi indeks harga konsumen (CPI).

Jenis Inflasi Berdasarkan Penyebabnya

Menurut (Suhardi & Tambunan, 2022) berlandaskan pada faktor peningkatan suatu harga yang terjadi maka inflasi ini umumnya dibedakan menjadi tiga bagian yakni:

1. permintaan yang tinggi. Ketika permintaan suatu barang atau jasa melebihi jumlah yang ditawarkan, harga naik. Permintaan didorong oleh beberapa faktor seperti pertumbuhan penduduk, peningkatan daya beli masyarakat, dan program pemerintah yang mendorong konsumsi.
2. peningkatan biaya produksi. Ketika biaya produksi seperti harga bahan baku, pegawai, dan energi mengalami kenaikan, produsen cenderung meningkatkan harga produknya. Peningkatan biaya produksi ini penyebabnya adalah faktor internal maupun eksternal, seperti kenaikan harga minyak dunia atau fluktuasi nilai tukar.
3. kebijakan moneter atau fiskal yang akomodatif yang dapat meningkatkan peredaran uang di masyarakat. Jika peningkatan jumlah uang beredar ini tidak dibarengi dengan peningkatan produksi, maka harga cenderung naik. Dampak inflasi yang tinggi bisa berakibat negatif terhadap perekonomian. Potensi dampaknya mencakup penurunan daya beli masyarakat, peningkatan biaya hidup, dan ketidakstabilan perekonomian secara umum. Berbagai upaya telah dilakukan Indonesia untuk mengendalikan inflasi, antara lain pengendalian penawaran dan permintaan, stabilisasi harga kebutuhan sehari-hari, serta pengaturan kebijakan moneter dan fiskal. Selanjutnya, Bank Indonesia, bank sentral Indonesia, bertanggung jawab menjaga stabilitas harga dan melaksanakan kebijakan moneter sesuai dengan kondisi perekonomian.

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik), Saat ini BPS juga menerbitkan inflasi berdasarkan kelompok tersendiri yang disebut dekomposisi inflasi. Disagregasi inflasi menciptakan ukuran inflasi yang memperhitungkan dampak faktor-faktor fundamental.

Inflasi Inti dan Inflasi Non Inti

1. **Inflasi Inti**, yakni unsur inflasi yang cenderung stabil atau persisten. (komponen persisten) Ini mempengaruhi pergerakannya dan mempengaruhi faktor fundamental. Faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi inti adalah :

- 1) Interaksi penawaran dan permintaan
- 2) Lingkungan eksternal seperti nilai tukar, harga bahan baku internasional, dan tren perekonomian dunia
- 3) Ekspektasi inflasi di masa depan.

2. Inflasi non-inti

Inflasi non-inti, yakni komponen inflasi cenderung lebih fluktuatif karena dipengaruhi oleh faktor selain faktor fundamental. Komponen inflasi non inti terdiri dari:

- 1) Faktor inflasi yang mudah menguap (*volatile food*): Inflasi terutama dipengaruhi oleh guncangan pada kelompok bahan pangan, seperti panen raya, fluktuasi alam, dan pendorong harga bahan baku pangan dalam dan luar negeri.
- 2) Komponen inflasi harga yang dikendalikan pemerintah (*managed price*): Inflasi terutama dipengaruhi oleh guncangan berupa kebijakan harga pemerintah, seperti Subsidi harga bahan bakar, harga listrik, biaya transportasi, dll.

Al-maqrizi berpendapat bahwa dalam ekonomi islam faktor penyebab inflasi antara lain sebagai berikut:

- a. Natural factors inflation (faktor alamiah)

Inflasi alamiah disebabkan karena bencana alam.

- b. Human error (kesalahan manusia)

Faktor kedua adalah karena human error, seperti :

- 1) Korupsi dan administrasi yang buruk oleh mereka yang berkuasa.
- 2) Banyak pejabat yang korup meningkatkan pengeluaran pemerintah secara besar-besaran dan menyebabkan pemerintah mengenakan pajak yang berlebihan.
- 3) Peningkatan peredaran mata uang asing

Dampak Inflasi

Penelitian yang dilakukan oleh (Suhardi & Tambunan, 2022) beberapa dampak negatif inflasi pada perseorangan serta masyarakat diantaranya yaitu:

1. Standar kesejahteraan akan menurun

Ketika inflasi terjadi di dalam negeri, daya beli masyarakat melemah sementara harga-harga bisa terus naik. Jika harga terus naik, masyarakat, terutama yang berpendapatan paling rendah atau sedang, akan kesulitan memenuhi kebutuhan pokok sekalipun. Tentu saja hal seperti itu mengurangi kebahagiaan masyarakat.

2. Memburuknya distribusi pendapatan

Apabila tingkat pendapatan masyarakat didukung oleh pertumbuhan yang tinggi, maka dampak negatif inflasi terhadap kesejahteraan masyarakat memang dapat dihindari. Namun kenyataannya, seiring dengan meningkatnya inflasi, banyak masyarakat yang tidak mampu meningkatkan pendapatannya sehingga berdampak pada menurunnya kekuatan ekonomi.

3. Rusaknya stabilitas perekonomian

Inflasi dapat merusak stabilitas perekonomian dengan menghancurkan ekspektasi para pelaku ekonomi terhadap kondisi masa depan. Konsumen yang pendapatannya tinggi pasti akan mengonsumsi barang dan jasa dengan jumlah yang besar lantaran mereka memperkirakan bahwa harga pada barang dan jasa akan kembali naik. Pada saat yang sama, konsumen miskin semakin kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari seiring dengan kenaikan harga.

ISI PEMBAHASAN

Inflasi Menurut Ekonomi Islam

Kaidah ekonomi Islam berasumsi bahwa inflasi berbahaya bagi ekonomi dan juga keadilan sosial sehingga Islam menentang fenomena inflasi. Dan menurut perspektif ekonomi Islam, melindungi stabilitas inflasi adalah tanggung jawab moral sesuai dengan asas keadilan, dan landasan dalam agama Islam. Maka dari itu, sangat penting menjalankan asas ekonomi Islam untuk mewujudkan stabilitas ekonomi dan keadilan sosial yang diinginkan masyarakat. (Salam, 2020).

Al maqri-zi berpendapat bahwa, inflasi disebabkan oleh kenaikan harga yang terus-menerus, dan pernyataannya didukung oleh beberapa fakta tentang kelaparan di Mesir, dimana inflasi yang terus-menerus menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, yang juga turut menyebabkan terjadinya kelaparan tersebut. perekonomian negara. Inflasi ini sekaligus disebabkan oleh kenaikan tarif seluruh kelompok pengeluaran, baik makanan, barang konsumsi,

minuman, rokok, hasil tembakau dan juga kebutuhan lainnya. inflasi juga dipicu oleh sektor lain seperti pendidikan, transportasi komunikasi serta keuangan (Widiati & Nugroho, 2020).

Chapra menjelaskan bahwa inflasi merupakan fenomena yang berbahaya dan dapat mengancam stabilitas perekonomian, sedangkan deflasi dapat memperburuk kondisi perekonomian dengan memperlambat pertumbuhan dan menimbulkan pengangguran. Inflasi bertentangan dengan nilai-nilai Islam, resesi ekonomi dan pengangguran jangka panjang juga tidak dapat diterima, karena menimbulkan kesengsaraan bagi kelompok sosial tertentu dan tidak sesuai dengan tujuan kesejahteraan ekonomi. Jumlah uang yang beredar di masyarakat dibandingkan dengan jumlah barang atau jasa yang ada akan menimbulkan tekanan harga. Maka dari itu, Chapra menekankan pentingnya menjaga keseimbangan perekonomian antara jumlah uang dan ketersediaan barang dan juga jasa untuk mengendalikan inflasi.

Pengendalian inflasi dalam ekonomi islam

Perekonomian Islam memiliki strategi dan juga cara tersendiri dalam pengendalian inflasi yang berbeda dengan sistem perekonomian lain. Dimana dalam ekonomi Islam menerima adanya kebijakan fiskal dan juga moneter sebagai komponen dari usaha pengendalian inflasi. Namun dalam ekonomi islam harus ada kesetaraan dan demi memperoleh kesetaraan itu memerlukan upaya sosial ekonomi untuk melindungi kestabilan harga yaitu dengan usaha memperbaiki perilaku dan moral, pemerataan pendapatan, serta menghilangkan semua hal yang mengandung unsur riba (bunga). (Samsul dkk, 2019). mengendalikan inflasi merupakan kewajiban bagi pemerintah negara karena inflasi ini berdampak langsung pada masyarakat. Sehingga untuk mengendalikannya melalui beberapa kebijakan yang mencakup kebijakan moneter dan nonmoneter sebagai berikut:

1. Kebijakan fiskal

An Nabahah berpendapat bahwa, menurut ekonomi islam pemerintah merupakan suatu lembaga formal yang bertugas menciptakan serta menyajikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. kebijakan moneter dan fiskal yang digunakan oleh pemerintahan islam ini telah dilakukan dari zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin lalu dikembangkan oleh para Ulama, dimana dalam Islam kebijakan fiskal bertujuan untuk mewujudkan kestabilan ekonomi, kemajuan dalam ekonomi, pemerataan distribusi pendapatan. Kebijakan fiskal ini mencakup pajak bumi dan bangunan, utang atau pinjaman untuk kestabilan perekonomian nasional dan mensejahterakan rakyat.

Berdasarkan pendapat Umer Chapra yang menyatakan bahwa, strategi atau cara untuk mengendalikan inflasi itu ada tiga yang pertama, dengan perbaikan moral (baik dalam dimensi material maupun dimensi spritual). Yang kedua, pemerataan pendapatan dan juga kekayaan. Dan yang ketiga, menghilangkan adanya transaksi riba (bunga).

a) Perbaikan moral

Kebahagiaan manusia dapat dicapai dengan memenuhi kebutuhan materi dan spiritual manusia. Ekonomi Islam mendorong pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam pemberian Tuhan untuk kepentingan umat manusia. Dalam islam juga mengajarkan seseorang agar jangan terikat kepada suatu hal, dan tidak memandang kepuasan materi sebagai tolak ukur utama kebahagiaan manusia serta melupakan nilai-nilai spiritual dari kemanusiaan itu sendiri. Islam percaya bahwa kehidupan material dan spiritual itu saling melengkapi yang membentuk dasar kebahagiaan dan kesejahteraan manusia yang sejati.

b) Pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan.

Ekonomi islam memberikan panduan untuk mengatur semua aspek kehidupan, termasuk kehidupan sosial ekonomi. Pemerataan pendapatan dan kekayaan merupakan tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua sistem ekonomi. Namun hal ini tidak dapat diwujudkan tanpa adanya keimanan yang didasari oleh persaudaraan antarmanusia. Proses pemerataan pendapatan dan kekayaan mudah dicapai, karena perhatian terhadap persaudaraan dan gotong royong antar manusia hanya ditentukan oleh sikap keagamaan seseorang.

c) Selain sebagai perintah agama, konsep penghapusan riba dalam kehidupan Ekonomi Islam dapat menghapus ketidakadilan dalam bertransaksi ekonomi dan eksploitasi terhadap sesama warga negara melalui sistem bagi hasil yang merupakan unsur paling penting dalam mewujudkan keadaan keuangan yang seimbang.

Implementasi kebijakan fiskal ini bisa membuka lapangan pekerjaan, hal ini dapat terjadi apabila investasi digunakan untuk menghapus kesenjangan sosial ekonomi masyarakat jika investasi tadi bisa mendapatkan keuntungan hal ini akan membuat para pengusaha menjalankan investasi baru yang akan membuka banyak peluang lapangan kerja dimana dalam ekonomi islam mempunyai tujuan untuk

mendorong dan membantu perekonomian masyarakat yang tertinggal serta memajukan dan memperluas penyebaran islam seluas mungkin (Ardiansyah,2023).

2. Kebijakan moneter

Kebijakan moneter ini adalah suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral didalam jumlah uang yang beredar dimasyarakat dengan menggunakan instrumen moneter, melalui bank sentral ini diharapkan dapat mengatur peredaran uang sedemikian rupa sehingga inflasi bisa dikendalikan. Dalam hal ini bank sentral dapat menggunakan tiga kebijakan untuk mengendalikan inflasi diantaranya:

- 1) kebijakan diskonto (*discont policy*) adalah kebijakan menaikkan dan menurunkan tingkat bunga untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar.
- 2) Operasi pasar terbuka (OPT) adalah tindakan yang dilakukan bank sentral melalui jual beli. barang yang bernilai tinggi dalam rangka pengendalian uang yang beredar dimasyarakat.
- 3) Kebijakan persediaan kas (*cash ratio policy*) adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral demi mempengaruhi jumlah uang yang beredar melalui cara menurunkan dan menaikkan presentase persediaan kas yang berasal dari bank.

Kebijakan moneter dalam perekonomian syariah terdiri dari percepatan peredaran uang di sektor riil yang kemudian dimanfaatkan secara optimal sehingga mampu memajukan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas perekonomian syariah tanpa instrumen riba dan inflasi moneter dengan mencetak uang yang baru atau anggaran defisit. Jadi dalam konsep kebijakan moneter Islam, yang harus dikumpulkan adalah system bagi hasil, bukan bunga (Ardiansyah, 2023)

Inflasi dapat dikendalikan menggunakan intrumen moneter syariah yaitu dengan menjauhi penggunaan instrumen moneter yang mengandung unsur riba (bunga), masyir, gharar, serta zhulum. Kebijakan moneter Islam tidak boleh mengandung komponen riba atau bunga. Riba termasuk bunga bank, dilarang keras dalam Islam dengan larangan ini, bunga bank, alat utama pengelolaan uang dalam kebijakan moneter. Di sisi lain, kebijakan moneter yang bertujuan tunggal untuk stabilitas harga (pengendalian inflasi) biasanya mengikuti pendekatan harga, dan di sisi lain, kebijakan moneter memiliki banyak tujuan, seperti tidak hanya stabilitas harga, tetapi juga pertumbuhan ekonomi, kenaikan harga, kesempatan kerja dan keseimbangan internasional, yang biasanya menggunakan pendekatan kuantitatif. Dimana di indonesia dalam pengendalian inflasi diperankan oleh tiga pihak.

Pengelolaan uang Islam didasarkan pada prinsip bagi hasil.

1. Diperankan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan penerima amanat perundang-undangan.
2. Pemerintah yaitu kerjasama semua kementerian yang dikordinir oleh menteri ekonomi bersama dengan pemerintah daerah.
3. Masyarakat sebagai pelaku ekonomi (Kurniawati, 2019).

Husain Shahathah, menjelaskan ada beberapa solusi untuk mengendalikan inflasi menurut ekonomi Islam, yakni dengan mereformasi sistem moneter dengan mengaitkan jumlah uang yang beredar dengan output, mengarahkan berbelanja sesuai dengan kebutuhannya saja dan melarang kegiatan yang berlebihan atau boros, melarang penyimpanan aset (menimbun aset) dan mendorong investasi, peningkatan produksi untuk kemajuan material dan moral masyarakat, menjaga ketersediaan kebutuhan pokok, menerapkan prinsip moneter syariah dan perpajakan, seperti menggunakan mata uang yang stabil, menurunkan suku bunga (riba) atau nol, dan meningkatkan kapasitas mata uang dalam menyerap uang pada sektor riil dan investasi, menjauhi transaksi keuangan spekulatif (maisyr), meningkatkan pendapatan melalui zakat, menjadikan zakat sebagai alat kebijakan fiskal. Hal lain yang perlu untuk dilaksanakan yaitu meningkatkan kualitas moral administrasi publik, PNS, menciptakan sistem administrasi dan pelayanan yang efisien dan efektif, meningkatkan etika moral PNS melalui pelatihan, serta peningkatan konsumsi masyarakat dan belanja negara, termasuk perbaikan perilaku pemerintah dalam menjalankan pemerintahan (Hariyanto, 2019).

Salah satu penyebab inflasi adalah konsep "*time value of money*" yang menyatakan bahwa nilai uang pada saat ini lebih berharga daripada nilai uang yang sama di masa depan. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku pada prinsip syariah. Dimana pada prinsip syariah disebut "*Economic Value Of Time*" yang berarti bahwa uang sebenarnya tidak mempunyai nilai waktu, mempunyai nilai ekonomi dan hanya digunakan sebagai alat tukar saja. Oleh karena itu, salah satu strategi pengendalian inflasi adalah dengan menerapkan konsep nilai "*Economic Value Of Time*" (Fajar, 2021).

Dalam Islam uang harus beredar dalam perekonomian dan tidak boleh dibiarkan terlalu lama, apalagi bertahun-tahun. Berdasarkan prinsip *time value of money*, uang sekarang lebih berharga dibandingkan uang pada beberapa tahun kedepan. Kedua hal ini memaksa kreditur untuk mengurangi (bunga) dengan persentase tertentu tanpa memperhitungkan risiko yang dihadapi

debitur. Situasi ini, sebagaimana digunakan oleh ilmu ekonomi konvensional, yang di tolak keras oleh ilmu ekonomi Islam, khususnya keadilan “al qhumu bi qhurmi” (mencapai hasil tanpa menimbulkan risiko) dan “al kharaj bi ladhama” (mencapai manfaat tanpa menimbulkan biaya). (Yuliono, 2017)

Implementasi *Economic Value of Time* dalam Akad yakni dalam empat akad utama yaitu, al Musyarakah, al Mudharabah, al Muzara'ah, dan musaqolah. Konsep bagi hasil yang ditawarkan oleh Islam dapat diterapkan dalam bentuk *economic value of time*. Karena pada dasarnya uang tidak memiliki nilai waktu seperti yang dikatakan oleh aliran *time value of money*, tetapi waktulah yang memiliki nilai ekonomi. (Faruq U, 2021)

Menurut konsep fikih zakat, sistem zakat bertujuan untuk mengintegrasikan partai-partai muslim yang surplus dan partai-partai muslim yang defisit. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi pemerataan pendapatan antara umat Islam yang surplus dan defisit, atau bahkan dengan harapan dapat mengubah kelompok defisit (mustahik) menjadi kelompok surplus (muzakki). Pengumpulan dan pendistribusian serta potensi zakat (termasuk infaq dan sedekah) sebagai alat pengentasan kemiskinan akhir-akhir ini menjadi topik utama yang perlu disoroti dalam penelitian multifaset dalam literatur ekonomi Islam. Faktanya, Zakat sebagai sebuah teori telah banyak dipelajari oleh para intelektual Muslim yang terlibat dalam pembangunan dan keuangan.

Selain itu, Zakat dan Wakaf juga diperhitungkan dalam kebijakan fiskal. Faktanya, Zakat juga dapat menciptakan stabilitas sehingga menurunkan inflasi. Pendapat-pendapat di atas walaupun berbeda prioritasnya, namun mempunyai persamaan. (Samsul, Najamuddin M. H, Hotman G. N, 2019)

KESIMPULAN

Menurut konsep ekonomi islam, inflasi bukanlah suatu masalah yang besar dalam perekonomian. Sebab, penggunaan dirham dan dinar sebagai mata uang. Namun penurunan nilainya mungkin masih bisa terjadi, yakni ketika nilai dari emas sebagai pendukung nilai nominal dari dinar menurun, misalnya akibat ditemukannya uang dalam jumlah yang besar. Namun, situasi seperti itu tidak mungkin terjadi. Menurut Al Maqri-zi, inflasi ini disebabkan oleh kenaikan harga yang terus-menerus, dan menurut Umer Chapra, inflasi merupakan fenomena yang berbahaya dan dapat mengancam stabilitas perekonomian.

Ekonomi islam ini memiliki cara dan strategi sendiri untuk mengendalikan inflasi yang sangat berbeda dengan sistem ekonomi yang lain. ekonomi Islam menerima adanya kebijakan moneter dan fiskal sebagai bagian dari usaha mengendalikan inflasi. Namun demikian, dalam sistem ekonomi islam ini kebijakan moneter dan fiskal harus ada keadilan sosial dan pemerataan ekonomi sehingga untuk mencapai standar keadilan sosial dan ekonomi, diperlukan usaha untuk mewujudkan kesetabilan harga dengan cara perbaikan moral, pemerataan pendapatan dan kekayaan dan menghilangkan atau penghapusan unsur riba (bunga).

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, H. (2023). Pengendalian inflasi dalam sistem ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, Akuntansi*, 2(1), 35-46.
- Bintara, Y. P., & Wahyudi, A. (2023). Mekanisme pengendalian inflasi: Pendekatan Islam dalam memelihara stabilitas harga. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(3).
- Budi, T., & Muhammad, A. B. (2021). Transmisi kebijakan moneter syariah di Indonesia: Review literatur. *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 177–191.
- Fajar, D. A. (2021). Kajian perbedaan time value of money atau economic value of time dalam perspektif syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1435–1440.
- Hariyanto, M. (2019). Perspektif inflasi dalam ekonomi Islam. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 79–95.
- Naqiyya, A. N., et al. (2023). Pengendalian inflasi di Indonesia perspektif M. Umer Chapra. *Istithmar*, 7(1), 50–65.
- Salam, W. R. (2020). Inflasi ditengah pandemi dalam perspektif Islam. *Jurnal Syntax Transformation*, 1(5), 187–192.
- Samsul, N. M. H., & Nasution, H. G. (2019). Sistem pengendalian inflasi dalam sistem ekonomi Islam. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 1(1), 16–28.
- Simanungkalit, E. F. B. (2020). Pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Journal of Management: Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 13(3), 327–340.
- Tambunan, K., & Suhardi, A. A. (2022). Cara mengatasi inflasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia berdasarkan perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 3(1), 32.
- Yuliono. (2017). Time value of money dalam. *El Jizya (Jurnal Ekonomi Islam)*, 5(1), 177–192.